

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Selasa, 27 November 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (Halaman, 21)	Selasa, 27 November 2018	Proyek Aerocity Kertajati Berjalan Bulan Depan	Kawasan Aerocity Kertajati di Majalengka berfungsi sebagai koridor industri di kawasan timur Jawa Barat. Proyek ini digadang-gadang mampu menjadi pendorong perekonomian kawasan Ciayumajakuning atau Cirebon – Indramayu-Majalengka-Kuningan, Nantinya, Kertajati Aerocity memiliki akses ke kawasan industri Karawang dan Bandung.
2	Kompas (Halaman, 10)	Selasa, 27 November 2018	Mangrove Redam Dampak Tsunami	Hutan mangrove terbukti efektif melindungi permukiman dari tsunami yang melanda Teluk Palu pada 28 September 2018. Temuan itu diharapkan menjadi pertimbangan bagi penataan kawasan tersebut ke depan. Temuan efektivitas mangrove itu disampaikan perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Uderkh, di Jakarta, Senin (26/1).
3	Kompas (Halaman, 14)	Selasa, 27 November 2018	Berita Foto	Kendaraan melintas di Jalan Tol Depok – Antasari seksi I di gerbang Tol Cilandak Utama, Jakarta Selatan.
4	Media Indonesia (Halaman, 15)	Selasa, 27 November 2018	Hunian Terjangkau untuk Pengabdian Negara	Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik inisiatif pemerintah dan siap membantu mewujudkan rumah bagi ASN dan TNI – Polri tersebut.
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 27 November 2018	Sinergi 2 BUMN Menjamin Pasok BBM	Gembar-gembor tersambungannya ruas tol Trans- Jawa dari Merak-Surabaya sepanjang 870 kilometer sampai dengan akhir tahun ini cukup dinantikan publik, khususnya yang berencana menggunakan tol untuk mudik.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Selasa, 27 November 2018	Majalengka Lepas Izin 1.000 Ha untuk Aerocity	Pemerintah kabupaten Majalengka mengeluarkan izin prinsip bagi PT Bandarudara Internasional Jawa Barat atau BIJB untuk membangun kawasan kota bandara atau aerocity seluas 1.000 hektare.
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 22)	Selasa, 27 November 2018	PUPR Siapkan Rp 20 Miliar untuk Karet Rakyat	Kementerian PUPR menyiapkan dana sekitar Rp 20 Miliar untuk menyerap karet dari perkebunan rakyat dengan harga sedikit di atas pasaran.

Judul	Proyek Aerocity Kertajati Berjalan Bulan Depan	Tanggal	Selasa, 27 November 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 21)		
Resume	Kawasan Aerocity Kertajati di Majalengka berfungsi sebagai koridor industri di kawasan timur Jawa Barat. Proyek ini digadang-gadang mampu menjadi pendorong perekonomian kawasan Ciayumajakuning atau Cirebon – Indramayu-Majalengka-Kuningan, Nantinya, Kertajati Aerocity memiliki akses ke kawasan industri Karawang dan Bandung.		

Proyek Aerocity Kertajati Berjalan Bulan Depan



Rencana pembangunan Aerocity Kertajati.

Izin prinsip pembangunan kawasan terpadu sudah terbit.

Fery Firmansyah
fery_f@tempo.co.id

BANDUNG — Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan sudah menerbitkan izin prinsip pembangunan kawasan Aerocity Bandar Udara Kertajati. Menurut dia, dari total luas lahan 3.500 hektare, izin yang sudah diterbitkan sementara untuk 1.000 hektare.

Setelah izin ini terbit, Karna mengatakan, pembangunan Aerocity Kertajati bisa dimulai awal bulan depan. "Akan dimulai dengan pembangunan apartemen," kata dia selepas pelantikan dirinya oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, kemarin.

Izin prinsip tersebut terbit pada pekan lalu. Karna mengatakan PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) — konsorsium pengelola jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) — juga sudah menemuinya untuk mengurus perizinan rencana membangun jalan tol yang menjadi akses menuju kawasan Aerocity Kertajati. "Mereka meminta izin untuk membebaskan 3 kilometer lahan menuju Aerocity," ujar dia.

Menurut Karna, CKJT berniat membangun akses tambahan dari Ujung Jaya, bagian dari ruas jalan tol Cisumdawu, menuju Aerocity. Jalan tol tersebut

juga akan menghubungkan Aerocity menuju jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Kilometer 152. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menginisiasi akses jalan tol dari Bandara Kertajati menuju jalan tol Cipali di KM 158. "Tol provinsi langsung ke bandara, sedangkan dari tol Cisumdawu masuk ke Aerocity," kata dia.

Aerocity Kertajati adalah kawasan terpadu berisi hunian, perkantoran, dan area komersial lain. Proyek ini diproyeksikan sebagai pendukung aktivitas ekonomi wilayah Jawa Barat bagian timur.

Karna mengatakan keberadaan Aerocity akan menunjang pertumbuhan penerbangan di Bandara Kertajati. Menurut dia, sepiunya penerbangan di bandara itu saat ini tak cuma disebabkan akses yang terbatas, tapi juga minimnya infrastruktur pendukung. "Baru ada bandara, belum ada hotel, restoran, rumah sakit. Karena itu, kami ingin mengundang investor untuk bersama-sama mempercepat pembangunan Aerocity," kata dia. Karna pun menjanjikan percepatan proses perizinan lewat layanan terpadu. "Asalkan seluruh persyaratan sudah lengkap, dalam dua hari saya sudah tanda tangan."

Direktur Utama PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Virda Dimas Ekaputra, menga-

takan sudah mengantongi izin prinsip pembangunan Aerocity Kertajati untuk 160 hektare lahan yang sudah dibebaskan. "Pengajuan izin prinsip itu bisa dilakukan asal lahannya," kata dia kepada *Tempo*.

Virda mengklaim warga

MENDORONG PEREKONOMIAN CIAYUMAJAKUNING

KAWASAN Aerocity Kertajati di Majalengka berfungsi sebagai koridor industri di kawasan timur Jawa Barat. Proyek ini digadang-gadang mampu menjadi pendorong perekonomian kawasan Ciayumajakuning atau Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan. Nantinya, Kertajati Aerocity memiliki akses ke kawasan industri Karawang dan Bandung.

Profil Kertajati Aerocity

Luas lahan: 3.480 hektare
Rencana pembangunan: 2018-2025

Klaster:

- **Logistic park:** 429 hektare
- **Creative and technology center:** 544 hektare
- **Energy center:** 126 hektare
- **Business park:** 672 hektare
- **Aerospace park:** 335 hektare
- **Residential park:** 1.374 hektare

Akses:

- Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)
- Jalan tol Cikampek-Palimanan (Cikapi)
- Rel kereta api Bandung-Kertajati dan Kertajati-Cirebon

● FERY F.

yang menghuni calon lahan Aerocity sudah menyetujui pembebasan propertinya. BIJB memproyeksikan luas lahan Aerocity mencapai 3.500 hektare dan pembebasannya akan dilakukan bertahap dalam 30 tahun.

Menurut Virda, pada tahap awal, BIJB lewat anak usahanya menggandeng PT PP Properti Tbk untuk membangun apartemen. Pembangunan tahap pertama berlangsung untuk dua *tower* masing-masing 15 lantai. Rencananya, ada empat *tower* yang tuntas dalam tiga tahun.

Untuk pengembangan bandara, BIJB masih mengupayakan penambahan rute penerbangan. Akhir tahun ini, Virda menarget-

kan ada 14 rute penerbangan di Bandara Kertajati. "Kami akan menambah rute baru, yaitu Balikpapan dan Pontianak."

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan wilayah Majalengka-Subang-Cirebon akan menjadi pusat pembangunan ekonomi Jawa Barat dalam 10 tahun ke depan. "Karena bandara sudah jadi, (pelabuhan) Patimban sudah ada, Cirebon akan banyak dibangun. Saya ingin mengawal segitiga Cirebon-Patimban-Bandara (Kertajati), di mana Majalengka yang dominan harus ditata dari awal. Jangan tata ruangnya asal-asalan," kata dia.

● AHMAD FIKRI (BANDUNG)

Judul	Mangrove Redam Dampak Tsunami	Tanggal	Selasa, 27 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 10)		
Resume	Hutan mangrove terbukti efektif melindungi permukiman dari tsunami yang melanda Teluk Palu pada 28 September 2018. Temuan itu diharapkan menjadi pertimbangan bagi penataan kawasan tersebut ke depan. Temuan efektivitas mangrove itu disampaikan perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Uderkh, di Jakarta, Senin (26/1).		

Mangrove Redam Dampak Tsunami

JAKARTA, KOMPAS — Hutan mangrove terbukti efektif melindungi permukiman dari tsunami yang melanda Teluk Palu pada 28 September 2018. Temuan itu diharapkan menjadi pertimbangan bagi penataan kawasan tersebut ke depan.

Temuan efektivitas mangrove itu disampaikan perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Uderkh, di Jakarta, Senin (26/11/2018). "Adanya area permukiman terlindungi tsunami karena mangrove ini jadi salah satu temuan tim survei Operasi Bakti Teknologi (OBT) Sulteng. Temuan ini diharapkan jadi pertimbangan bagi penataan daerah terdampak bencana," kata Uderkh, yang juga Ketua Tim OBT.

Dalam survei itu ditemukan, keberadaan hutan mangrove di pesisir Donggala, Sulteng, mengurangi tingkat kerusakan akibat tsunami. Perkiraan luas mangrove di pesisir Donggala 22,46 hektar dan perkiraan panjang garis pantai yang ada mangrove 2.984 kilometer. Jenis tanaman mangrove di area itu meliputi *Rhizophora apiculata*, *Avicennia lanata*, *Nypa fruticans*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizo-*

phora stylosa, serta *Sonneratia alba*.

"Rumah-rumah di Kampung Kabonga dan Labuan Bajo, Kabupaten Donggala, tak rusak karena terlindungi hutan mangrove setebal 50-75 meter. Di luar hutan mangrove, tinggi tsunami 5 meter, tetapi sampai di rumah warga tinggal 1 meter. Itu membuktikan, hutan mangrove efektif meredam dampak tsunami," kata Widjo Kongko, peneliti tsunami BPPT, yang terlibat survei itu.

Sejumlah kajian sebelumnya menunjukkan, mangrove efektif mengurangi dampak tsunami sampai ketinggian 7 meter. "Jadi, tergantung jenis dan ketebalan mangrovenya. Mangrove mengurangi dampak tsunami di Kampung Lahewa, Pulau Nias, setelah gempa dan tsunami pada 2005 yang ketinggiannya airnya saat itu 5-6 meter," kata Widjo.

Untuk itu, penanaman mangrove perlu jadi pertimbangan penataan pesisir di Teluk Palu. "Kini ada wacana membangun tanggul laut di Teluk Palu. Menurut temuan ini, kami merekomendasikan memakai mangrove sebagai benteng alam," ujarnya.

Menurut Widjo, wacana pembangunan tanggul di Teluk Palu

muncul dalam diskusi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pekan lalu atas usulan tim Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA). "Saya diundang untuk memberi tanggapan dan saya sampaikan temuan tim peneliti soal mangrove," ucapnya.

Ekologis

Peneliti tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Abdul Muhari, memaparkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Pesisir dan Pulau Kecil, dampak tsunami ketinggian 10 meter bisa dikurangi dengan struktur dan nonstruktur. "Selain mahal, tanggul laut harus terus diperbarui. Tanggul memiliki usia pakai 30-50 tahun. Padahal, perulangan tsunami di Teluk Palu 30 tahunan," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih mempertimbangkan untuk memakai mangrove sebagai benteng alami. Selain perlindungan pesisir, tanaman mangrove punya fungsi ekologis.

Muhari mengatakan, dinamika tsunami di Teluk Palu unik dan butuh dukungan panel ahli untuk memitigasi keberulangan ancamannya di masa depan. (AIK)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 27 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Kendaraan melintas di Jalan Tol Depok – Antasari seksi I di gerbang Tol Cilandak Utama, Jakarta Selatan.		

Kelanjutan Tol Depok-Antasari



KOMPAS/PRIYOMBODO

Kendaraan melintas di Jalan Tol Depok-Antasari Seksi I di Gerbang Tol Cilandak Utama, Jakarta Selatan, Senin (26/11/2018). Sampai sekarang, baru sekitar 5,8 kilometer (km) ruas Tol Depok-Antasari yang sudah beroperasi, yakni dari Antasari atau Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR) sampai kawasan Brigif di Jagakarsa. Sementara ruas Brigif-Sawangan sepanjang 6,3 km direncanakan beroperasi 2019 dan Sawangan-Bojong Gede sepanjang 9,5 km pada Januari 2021.

Judul	Hunian Terjangkau untuk Pengabdian Negara	Tanggal	Selasa, 27 November 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 15)		
Resume	Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik inisiatif pemerintah dan siap membantu mewujudkan rumah bagi ASN dan TNI – Polri tersebut.		

Hunian Terjangkau untuk Pengabdian Negara

Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik inisiatif pemerintah dan siap membantu mewujudkan rumah bagi ASN dan TNI-Polri tersebut.

GHANI NURCAHYADI
gani@mediaindonesia.com

MASIH banyaknya aparat sipil negara (ASN) serta prajurit TNI-Polri yang belum memiliki rumah karena penghasilan yang tidak mencukupi menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Joko Widodo pun sempat menggelar rapat terbatas khusus mengenai hal itu awal November untuk memberikan mandat kementerian terkait dengan mengatasi masalah itu.

Catatan pemerintah menunjukkan, ada 945 ribu ASN, 275 ribu prajurit/PNS TNI, dan 360 ribu anggota/PNS Polri yang belum memiliki rumah. Pemerintah pun kini tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus agar mereka bisa segera memiliki rumah. Rencana itu kini sedang dimatangkan lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lain, seperti pengembang dan perbankan.

Di tingkat lembaga negara, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan saat ini terus

menggodok skema yang tepat bagi ASN memiliki rumah. Beberapa opsi yang dicermati salah satunya ialah melalui perluasan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Ada pula skema mengenai pembelian tanpa uang muka (*down payment/DP*) hingga tenor kredit yang panjang dari kredit kepemilikan rumah (KPR) biasanya. Tapi itu nanti masih dibahas dan kemungkinan disampaikan langsung menteri PU-Pera," ujar Khalaui di sela-sela perhelatan REI Mandiri Expo 2018 di Jakarta, Sabtu (17/11).

Di tingkat praktis, Kementerian PU-Pera juga menjalin kerja sama dengan pengembang untuk penyediaan rumah bagi ASN dan prajurit TNI-Polri tersebut. Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik inisiatif pemerintah tersebut dan siap membantu pemerintah mewujudkan rumah bagi ASN dan TNI-Polri tersebut.

Meski demikian, Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata mengingatkan ada tiga hal penting yang perlu diakomodasi oleh pemerintah untuk memudahkan pengembang dalam mewujudkan rumah bagi ASN dan TNI-Polri itu. Pertama, sinergitas Ke-

menterian PU-Pera dan Bank Indonesia dalam memastikan ASN yang harus bekerja berpindah-pindah dapat menikmati fasilitas FLPP.

"Kita tahu banyak anggota ASN terutama TNI-Polri yang bekerja berpindah-pindah bahkan hingga pelosok, sedangkan skema FLPP menyebutkan rumah harus ditempati. Nah, mereka ini butuh kombinasi kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi kepemilikan rumah," kata pria yang karib disapa Eman itu.

Kedua, REI juga meminta kebijakan pengecekan perbankan (*BI checking*) bisa diselaraskan karena saat ini masih banyak ASN dan TNI-Polri menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. Hal itu akan menyulitkan mereka mendapatkan kredit perumahan, meski kemampuan mencicil masih ada.

Ketiga, REI mengusulkan adanya fleksibilitas harga agar ASN dan TNI-Polri bisa mendapatkan hunian di lokasi strategis dekat dengan tempat mereka bekerja. Dalam hal pemenuhan rumah bagi ASN itu, REI akan membuat proyek percontohan pada tahun depan di Yogyakarta di atas la-

han seluas 50 hektare melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Peluang bisnis

Kalangan perbankan pun ikut bersiap membantu pemerintah dalam mewujudkan rumah bagi pengabdian negara tersebut. Direktur Retail PT Bank Mandiri Donsuwan Simatupang mengatakan, penyediaan rumah tersebut menjadi salah satu peluang bisnis menarik mengingat saat ini Bank Mandiri ingin menyasar semua segmen pasar dalam proses bisnisnya.

"Bank Mandiri siap menjadi mitra bagi pengembang mewujudkan rumah bagi ASN TNI-Polri. Ini peluang bisnis yang menarik. Soal jumlah penyaluran kredit nantinya kami pasti akan sesuaikan dengan permintaan," kata Donsuwan.

Secara keseluruhan, sampai akhir 2018, Bank Mandiri menargetkan penyaluran kredit di sektor properti dengan pertumbuhan dua digit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sampai Oktober 2018, kredit yang disalurkan ke sektor properti mencapai Rp42 triliun, naik 7,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. (Gnr/S-2)

Judul	Sinergi 2 BUMN Menjamin Pasok BBM	Tanggal	Selasa, 27 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Gembar-gembar tersambungny ruas tol Trans- Jawa dari Merak-Surabaya sepanjang 870 kilometer sampai dengan akhir tahun ini cukup dinantikan publik, khususnya yang berencana menggunakan tol untuk mudik.		

Sinergi 2 BUMN Menjamin Pasok BBM

Irene Agustine
irene.agustine@bisnis.com

Gembar-gembar tersambungny ruas tol Trans-Jawa dari Merak—Surabaya sepanjang 870 kilometer sampai dengan akhir tahun ini cukup dinantikan publik, khususnya yang berencana menggunakan tol untuk mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Namun, bagaimana ketersediaan bahan bakar minyak untuk menunjang aksesibilitas pengguna jalan tol nantinya?

Ketika melakukan perjalanan hingga ratusan kilometer, bahan bakar menjadi objek vital yang harus dipastikan pemenuhannya. Bayangkan, apabila di tengah perjalanan di tengah tol, pengguna jalan tidak mengisi BBM yang cukup sejak awal. Satu-satunya tumpuan hanyalah menuju tempat istirahat dan pelayanan (TIP) untuk menemukan stasiun penyediaan bahan bakar umum (SPBU).

Seiring dengan akan tersambungny tol Trans-Jawa secara berangsur, pengelolaan konsesi terbanyak di Trans-Jawa yakni PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) juga ingin memastikan pengguna jalan mendapatkan pelayanan maksimal dengan menggandeng PT Pertamina untuk memasok BBM di beberapa TIP sejumlah ruas tol yang akan segera beroperasi.

Kedua BUMN itu bersepakat menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka penyediaan SPBU. Dengan begitu, SPBU di TIP yang dikelola PT Jasamarga Properti (JMP), kelompok usaha JSMR, akan terjamin pasokannya oleh PT Pertamina Retail.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pemasaran Ritel Pertamina

Mas'ud Khamid dan Direktur Operasi I Jasa Marga Mohammad Sofyan, disaksikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (26/11).

Sekretaris Menteri Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan bahwa kerja sama tersebut rencananya dilakukan di 18 rencana pembangunan SPBU untuk tol JSMR yang akan beroperasi dalam waktu dekat.

"Saat ini ada 18 rencana pembangunan SPBU, tapi rencananya sampai Mei 2019 ada 10 SPBU yang akan beroperasi dengan sinergi ini," kata Imam.

Kesepuluh SPBU tersebut akan beroperasi di 3 TIP tipe A di ruas Semarang—Batang, 4 TIP tipe A di ruas Solo—Ngawi, 1 TIP tipe A di ruas Surabaya—Mojokerto, dan 2 TIP di ruas Gempol—Pasuruan pada Mei 2018.

TAK HANYA DI JAWA

Direktur Operasi I JSMR Mohammad Sofyan menuturkan bahwa secara umum, kontrak bersama Pertamina tidak hanya terpaku pada penyediaan BBM di TIP di Jawa, tetapi juga untuk beberapa ruas yang akan segera dioperasikan JSMR di luar Jawa. Beberapa di antaranya yakni satu TIP di ruas Medan—Kualanamu—Tebingtinggi, 1 di ruas Balikpapan—Samarinda, dan 1 di ruas Manado—Bitung.

Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan bahwa pemenuhan BBM untuk ruas tol yang akan beroperasi wajib adanya sebagai bentuk pelayanan kepada pengguna jalan.

Dia mengakui bahwa konstruksi pembangunan SPBU memang belum bisa langsung selesai semua, tetapi di-

targetkan sudah dapat melayani secara maksimal sebelum Idulfitri 2019.

"Memang belum bisa SPBU langsung selesai semua, tapi kami harapkan sebelum hari raya tahun depan SPBU dan *rest area* sudah bisa, bersamaan dengan konsep *rest area* yang mengutamakan kearifan lokal," ujarnya.

Direktur Utama JSMR Desi Arryani menambahkan bahwa pada tahun ini, Jasamarga Properti membangun 25 TIP/TI di seluruh ruas tol yang dikelola perseroan dan kelompok usahanya.

"Dari 25 unit tersebut, 18 unit yang dibangun merupakan *rest area* tipe A di mana keberadaan SPBU menjadi salah satu indikatornya," ujar Desi.

Hingga tahun 2019, total TIP/TI yang berada di ruas jalan tol Jasa Marga mencapai 57 unit, 28 unit diantaranya dikelola oleh JMP.

TIP/TI yang dikelola Jasamarga Properti di Pulau Jawa sebanyak 22 unit dengan perincian 15 unit merupakan tipe A, sedangkan 7 unit adalah tipe B. Untuk di luar Pulau Jawa, JMP masing-masing mengelola 2 unit TIP tipe A di tol Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi (Sumatra Utara), tol Balikpapan—Samarinda (Kalimantan Timur) dan Tol Manado—Bitung (Sulawesi Utara).

Sebelumnya, kerja sama antara Pertamina dan Jasa Marga telah terbukti memperlancar arus mudik balik Lebaran dan Libur Nasional 2018. Penyediaan BBM dalam kemasan membantu pengguna jalan tol dalam melakukan isi ulang yang praktis.

Selain kerja sama itu, Pertamina juga menandatangani kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Perseero) untuk optimalisasi pengelolaan aset PT KAI untuk pengembangan SPBU ataupun unit bisnis lainnya.

Judul	Majalengka Lepas Izin 1.000 Ha untuk Aerocity	Tanggal	Selasa, 27 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Pemerintah kabupaten Majalengka mengeluarkan izin prinsip bagi PT Bandarudara Internasional Jawa Barat atau BIJB untuk membangun kawasan kota bandara atau aerocity seluas 1.000 hektare.		

Majalengka Lepas Izin 1.000 Ha untuk Aerocity

BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan izin prinsip bagi PT Bandarudara Internasional Jawa Barat atau BIJB untuk membangun kawasan kota bandara atau aerocity seluas 1.000 hektare.

redaksi@bisnis.com

Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan pihaknya mengeluarkan izin prinsip untuk lahan aerocity 1.000 hektare dari 3.500 hektare yang direncanakan akan dibangun oleh PT BIJB dan mitra bisnisnya.

Lahan ini guna mengawali pembangunan apartemen dan hotel khusus haji.

"Izin prinsip 1.000 hektare dulu, [statusnya] sudah *clear*. Sebagian belum dibebaskan, tetapi yang sudah *fixed* itu baru 1.000 hektare," katanya di Bandung, Senin (26/11).

Menurutnya, izin ini akan memuluskan proses pembangunan yang akan segera diluncurkan oleh PT BIJB pada Desember mendatang.

Meski belum seluruhnya dibebaskan, Karna memastikan, pihaknya akan terus mempersiapkan pemberian izin hingga keseluruhan lahan seluas total 3.500 hektare sesuai kebutuhan aerocity.

"Sementara itu, 1.000 hektare, karena kita butuh untuk haji. Kita mengejar asrama haji," ujarnya.

Karna memerinci selain aerocity, kebutuhan fasilitas penunjang Bandara Kertajati juga masih membutuhkan banyak investor.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada hotel, restoran besar dan rumah sakit yang mumpuni sebagai bagian penting bandara.

"Kita ingin menghadirkan investor untuk bersama-sama membangun percepatan BIJB dan aerocity," tuturnya.

Pemkab Majalengka juga siap memberikan izin pada badan usaha jalan tol (BUJT) yaitu PT Citra Karya Jabar Tol yang menggarap jalan tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan yang ingin membuka

akses langsung menuju aerocity melalui Km 158 jalan tol Cikopo—Palimanan.

"Ini untuk membebaskan 3 kilometer lahan menuju aerocity. Tol itu akan loncat melewati jalan tol Cikopo langsung ke aerocity," katanya.

Pihaknya juga akan menopang kemudahan investasi masuk ke kawasan aerocity dengan menjamin kecepatan pemberian izin. Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Majalengka sudah siap menjalankan prosedur tersebut.

"Banyak kepentingan Jabar ada di Majalengka terkait keberadaan bandara dan aerocity. Ini sangat luar biasa tuntutan dan kompetisi," paparnya.

Kini begitu investor masuk ke pelayanan terpadu, pihaknya pada sore hari sudah menggelar rapat dengan tim. Esok harinya, tim melakukan survei lapangan dan mengkaji kelengkapan persyaratan.

Hasilnya akan masuk pada pihaknya yang kemudian mengundang investor untuk memerinci rencana bisnis hingga kebutuhan tenaga kerja. "Dalam 2 hari saya sudah tandatangan rekomendasi itu," ujarnya.

MINAT SINGAPURA

Di tempat yang sama, Sekda Jabar Iwa Kariwa mengatakan anak usaha Temasek PT Surbana Jurong & Enterprise Singapore sudah mendapatkan penawaran dari pihaknya terkait investasi di kawasan Aerocity Kertajati, Majalengka.

"Mereka berminat menggarap LRT [*light rail transit*] Bandung Raya, SPAM [sistem penyediaan air minum] Jatigede dan aerocity," tuturnya.

Menurutnya, perusahaan yang juga

► Pemkab Majalengka memastikan akan terus mempersiapkan pemberian izin lahan sampai dengan total 3.500 hektare sesuai kebutuhan aerocity.

► Sampai dengan saat ini belum ada hotel, restoran besar dan rumah sakit yang mumpuni sebagai bagian penting kawasan bandara.

menggarap masterplan TOD atau *transit oriented development* Walini untuk proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung tersebut tengah menjajaki sejumlah peluang investasi dan kerja sama baru dengan Jawa Barat.

"Untuk aerocity mereka akan membuat diskusi lebih lanjut. Ini sifatnya penajakan, karena peluangnya terbuka di sana," katanya.

Surbana Jurong, kata Iwa, juga telah menyampaikan kemampuan menarik mitra investor berikut mitra finansial dari Singapura untuk masuk ke kawasan komersial aerocity. Iwa berharap jika terealisasi, maka kawasan aerocity yang ruangnya sudah dipetakan oleh PT BIJB peruntukannya bisa terisioleh tenant-tenant internasional. "Ini baru tahapan minat, jadi memang perlu pertemuan lanjutan," tuturnya.

Direktur Utama PT Bandara Internasional Jawa Barat Aerocity Development (BIJB AD) Alfiansyah mengatakan aerocity yang akan menjadi penyangga Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, diyakini akan menjadi pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

"Dengan luasan sekitar 3.400 ha atau dua kali lipat dari luas bandara, kawasan khusus ini akan dibagi dalam enam klaster," ujarnya. (57)

Adapun enam klaster aerocity yang ditawarkan antara lain pusat energi, kawasan bisnis, hunian hingga pusat perawatan pesawat yang melayani rute penerbangan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. (57)

Judul	PUPR Siapkan Rp 20 Miliar untuk Karet Rakyat	Tanggal	Selasa, 27 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 22)		
Resume	Kementerian PUPR menyiapkan dana sekitar Rp 20 Miliar untuk menyerap karet dari perkebunan rakyat dengan harga sedikit di atas pasaran.		

PUPR Siapkan Rp20 Miliar untuk Karet Rakyat

JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dana sekitar Rp20 miliar untuk menyerap karet dari perkebunan rakyat dengan harga sedikit di atas pasaran.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto menyebutkan, pembelian karet rakyat akan digunakan untuk proyek-proyek jalan raya yang dikerjakan pada 2019. Saat ini, menurutnya, pemerintah sedang menyusun peta jalan terkait dengan perkiraan kebutuhan karet untuk campuran pengeras jalan raya.

“Perkiraan awal kami, kami akan menyisihkan dana sekitar Rp20 miliar—Rp30 miliar untuk membeli karet dari petani untuk proyek yang dikerjakan 2019,” jelasnya kepada *Bisnis*, Senin (26/11).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian PUPR untuk membeli secara langsung karet produksi petani atau melalui koperasi mulai Desember 2019.

Dia mengatakan, harga beli karet ditetapkan pada kisaran Rp7.500/kg—Rp 8.000/kg atau lebih tinggi dari harga pasaran saat ini yakni Rp6.000/kg.

Sugiyartanto mengatakan, pihaknya tengah menghitung proyeksi serapan karet dari dalam negeri dari kebijakan tersebut.

Sementara itu, rencana pemerintah untuk membeli langsung karet rakyat dinilai tidak akan mengompensasi penurunan ekspor komoditas itu secara signifikan.

Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) Azis Pane mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk membeli karet remah petani untuk campuran proyek infrastruktur jalan raya.

Namun, dia melihat, sektor pengolahan karet remah masih belum terlalu siap untuk mengakomodasi kebijakan pemerintah itu.

“[Meskipun demikian] untuk sementara sentimen positif terhadap perkebunan karet dan harga di tingkat petani cukup signifikan sebab harga pembelian yang ditawarkan pemerintah cukup bersaing,” jelasnya.

Bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor karet remah Indonesia sepanjang Januari—Oktober 2018 hanya mencapai US\$3,32 miliar, terkoreksi 22,70% secara *year on year*.

(Yustinus Andri)